





ketika tentang pembentukan lembaga MUI yang pada saat itu masih dianggap tabu. Disisi lain, lembaga tersebut sebagai alat pemerintah untuk mempersatukan umat Islam yang mayoritas masih dilanda perpecahan antar golongan serta kondisi pemerintahan yang masih belum stabil.

Persoalan pendidikan Islam menjadi perhatian yang serius, karena dianggap mampu untuk memperbaiki tatanan nilai masyarakat Indonesia. Apalagi agama Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas diantara sekian banyak agama yang diakui oleh pemerintah. Informasi terbaru adalah terdapat 7 agama<sup>4</sup> yang diakui oleh pemerintah dan ini bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati.

Dalam tesis Max Weber (1864 - 1920) disebutkan bahwa agama dengan seperangkat ajarannya adalah spirit untuk menentukan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Sosio - Kultural). Sedangkan dalam tesis Emile Durkheim (1857 - 1917) dinyatakan bahwa realitas sosial (Harmoni Sosial) adalah spirit untuk menentukan tata kelola kehidupan keagamaan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, meskipun Islam adalah agama mayoritas namun pola keberagaman yang dibangun oleh masyarakat multikultural di Indonesia adalah upaya untuk membangun keharmonisan sosial. Praktik keberagaman yang mereka kembangkan adalah upaya pengejawantahan prinsip ajaran agama masing - masing. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan

---

<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia sekarang menambah daftar agama baru yang secara resmi diakui. Setelah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, pemerintah menyatakan bahwa Baha'i merupakan agama yang keberadaannya diakui konstitusi. Lihat: [http:// www.republika.co.id /berita /dunia -islam/islam-nusantara/14/07/25/n97 vws -menag-akui-bahai-sebagai-agama-baru-di-indonesia](http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/07/25/n97_vws-menag-akui-bahai-sebagai-agama-baru-di-indonesia)

<sup>5</sup> Kunawi Basyir, *Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali* (Surabaya: ISLAMICA, Jurnal Studi Keislaman, Volume 8, Nomer 1, September 2013), 5.



dan di daerah Pasuruan. Kemudian kasus yang kedua adalah konflik horizontal antara Islam – Kristen di daerah Poso, Maluku dan Ambon.

Konflik yang di dasari atas nama suku adalah konflik horizontal antara etnis Madura - Dayak di daerah Sampit sekitar awal tahun 2001. Kemudian juga konflik horizontal di daerah Sambas sekitar tahun 1999. Akibat dari konflik tersebut tidak sedikit yang merenggut nyawa. Serta banyak infrastruktur di daerah konflik yang rusak sehingga perlu ada penanganan yang serius dari pemerintah.

Problem di atas kemudian menimbulkan suatu pertanyaan. Mengapa hal itu bisa terjadi?, padahal di dalam ajaran semua agama mengajarkan kebaikan kepada sesama, selain itu tidak sesuai dengan adat ketimuran yang cenderung sopan, ramah dan gotong - royong. Ataupun tidak ada peran pemerintah untuk mencegah atau meredam konflik horizontal tersebut?

Di sini, menjadi penting untuk mengkaji masalah kebijakan pemerintah dalam memberikan tatanan nilai kepada rakyat Indonesia karena ini menjadi tonggak dasar untuk menjadikan bangsa ini bisa hidup beragam dengan mengangkat nilai - nilai pendidikan. Tetapi perlu juga untuk disampaikan bahwa arah kemanusiaan - pendidikan – pemerintah menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena sebenarnya menjadi suatu sistem yang saling melengkapi.

Sebenarnya, sejak A. Mukti Ali menjadi menteri agama, banyak upaya yang dilakukan demi terjadinya masyarakat yang minim konflik. Hal ini dikarenakan basis akademik beliau yang mahir dalam bidang perbandingan















- a. ***Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan Islam di Indonesia.***<sup>14</sup> Penelitian ini berupa Thesis yang ditulis oleh Wahyudi pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Konsentrasi bidang Pendidikan agama islam. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran, bagaimana pesantren dan madrasah bisa muncul sebagai lembaga pendidikan yang mampu memberikan arahan dan pengembangan rakyat pribumi dan merupakan embrio dari pendidikan modern masa kini.
- b. ***Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi.***<sup>15</sup> Karya abd rachman assegaf ini merupakan buku yang diterbitkan dari hasil Desertasinya di Program Pasca Sarjana UIN Jogjakarta. Buku terbitan kurnia kalam ini menjelaskan rangkaian kebijakan pemerintah dalam pendidikan agama islam serta menggambarkan rangkaian sejarahnya.
- c. ***Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru.***<sup>16</sup> Karya Choirul Mahfud ini merupakan desertasi di program pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam desertasi ini menjelaskan tentang fenomena perpolitikan bangsa Indonesia pasca 1998 terhadap pendidikan islam, serta relasi politik dengan pendidikan secara umum.

---

<sup>14</sup> Wahyudi, *Pesantren dan Madrasah dalam politik Islam di Indonesia*, (Tesis – STAIN Kediri, 2002)

<sup>15</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005)

<sup>16</sup> Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*, (Desertasi - IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)













mencakup: teori politik pendidikan Islam dan teori kebijakan politik pendidikan Islam menurut berbagai tokoh.

**Bab ketiga**, membahas tentang profil dari A. Mukti Ali dan menjelaskan sejarah intelektual beliau sejak masa kanak - kanak sampai menjadi orang yang berpengaruh untuk kemajuan bangsa Indonesia.

**Bab ke empat**, membahas tentang kebijakan politik pendidikan Islam yang ini dibatasi pada masa orde baru kabinet pembangunan II dengan transisi waktu 28 Maret 1973 sampai 29 Maret 1978 pada saat itu dipimpin oleh presiden Suharto dan menteri agama A. Mukti Ali. Selain itu juga diuraikan mengenai hal menarik yang mempengaruhi kebijakan – kebijakan tersebut, serta pengaruhnya pada masa sesudahnya.

**Bab ke lima**, tentang penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran - saran. Diteruskan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.